

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun pembangunan manusia dapat diukur pada tiga aspek, yang mencakup; 1) Tingkat ekonomi dalam pendapatan perkapitanya, 2) Tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata tingkatan pendidikan masyarakat, dan 3) Tingkat kesehatan yang dapat dilihat pada angka harapan hidup. Semakin maksimal pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah, maka tingkat kesejahteraan sosialnya akan tinggi. Sehingga dengan demikian angka harapan hidup juga ikut meningkat. Jumlah Lansia di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun-ketahun, populasi manusia yang mulai menua dan mendominasi dapat disebut sebagai fenomena *ageing population* (penuaan penduduk). Penuaan penduduk tidak dapat dihindarkan oleh seluruh negara termasuk Indonesia. fenomena *ageing population* dapat diartikan baik bagi suatu negara, karena dengan adanya penuaan populasi yang tinggi, hal ini menunjukkan angka harapan hidup di negara tersebut juga tinggi atau baik, artinya pemerintah benar-benar melakukan pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2020).

World Health Organization memprediksikan bahwa, pada tahun 2030 yang akan datang setidaknya 1 dari 6 orang di seluruh dunia akan berusia 60 tahun keatas (WHO, 2022). Pada tahun 2020, jumlah penduduk dunia yang memasuki usia 60 tahun keatas telah mencapai pada angka 1 - 1,4 miliar. Indonesia sendiri sebagai negara telah memasuki struktur *ageing population* / penuaan penduduk. Pada skala nasional Indonesia, diproyeksikan pada tahun 2045 1 dari 5 penduduk Indonesia adalah berumur 60 tahun keatas / masuk dalam kategori Lanjut Usia. Angka harapan hidup nasional sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, dimana pada tahun 2021 umur harapan hidup Lansia berada pada posisi 71,57 tahun, dengan persentase Lansia pada angka 10,82%. *ageing population* / penuaan penduduk juga dapat

disebut sebagai bonus demografi kedua, namun demikian dengan penuaan tersebut, sebagian besar Lansia di Indonesia masih hidup secara produktif dan memberikan sumbangan ekonomi kepada negara (Heryanah, 2015).

Lansia selalu didefinisikan sebagai komunitas atau kelompok yang rentan pada struktur sosial. Kerentanan kelompok Lansia sendiri dapat ditandai dengan 3 aspek utama yang mencakup; 1) Kelompok Lansia yang telah tidak dapat melakukan kegiatan produktif sehingga tidak dapat menghasilkan kemandirian ekonomi, perubahan ekonomi dari dirinya memaksa perubahan pola kehidupan atau gaya hidupnya, 2) Kelompok Lansia telah memasuki fase dimana fisik menjadi lemah dan rentan terserang penyakit, sehingga kerap kali sering membutuhkan layanan dan fasilitas kesehatan, dan 3) Kelompok Lansia selalu membutuhkan pendampingan sosial dan keluarga, atau biasa disebut sebagai pengasuh, Lansia yang tidak produktif seringkali kehilangan kemampuan untuk melayani diri sendiri, sehingga membutuhkan bantuan pengasuh untuk melakukan aktivitas tersebut.

Penurunan fungsi fisiologis Lansia menjadi masalah utama bagi kelompok Lansia, jarang sekali manusia jika telah memasuki umur Lansia 60 keatas masih dapat melakukan kegiatan yang produktif. Penyakit umum yang diderita Lansia seperti; penyakit jantung, penyakit stroke, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan, merupakan daftar penyakit yang menjadi beban derita Lansia pada kawasan negara dengan berpenghasilan rendah. Angka harapan hidup di Indonesia yang mencapai umur 71,57 tahun masih dianggap rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi.

Lansia di Indonesia seringkali cepat kehilangan fungsi sosialnya di masyarakat. Kehilangan fungsi sosial disebabkan faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, yang menurunkan kualitas kehidupan kelompok Lansia. Turunnya kualitas kehidupan tersebut, mengakibatkan kelompok Lansia tidak memiliki daya untuk berpengaruh dan berkontribusi pada lingkungan sosial tempat tinggalnya. Justru sebaliknya, dengan Lansia kehilangan daya dan fungsi sosial, masyarakat sekitar Lansia termasuk; Keluarga, tetangga, tokoh

masyarakat, dan pemerintah, harus memberikan perhatian khusus dengan memberikan layanan dan perhatian sebagaimana kelompok Lansia butuhkan.

Regulasi yang mengamanatkan bahwa kelompok lansia harus diberdayakan dan dilayani kesejahteraan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kesejahteraan Lansia di Indonesia telah diatur secara jelas dan rinci melalui dua regulasi tersebut, artinya kesejahteraan Lansia di Indonesia telah sama diperhatikan sebagai bagian dari aspek yang harus di bantu oleh negara, melalui program-program pemerintah baik dari tingkat pusat, daerah, dan desa.

Program bantuan sosial yang secara khusus untuk kelompok Lansia, di Indonesia telah tersedia melalui program Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU). Program bertujuan lanjut usia merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai wujud perlindungan sosial bagi Lansia. Pada tahun 2020 besaran nominal uang dalam program Bantu-Lu sebesar Rp 2.700.000, besaran tersebut merupakan rincian dari Rp 1.500.000 bantuan langsung kepada Lansia, Rp 500.000 sebagai pegangan keluarga yang sedang merawat Lansia, dan Rp 700.000 sebagai dana perawatan Lansia atau terapi-terapi yang dibutuhkan Lansia (Kemensos, 2020). Penerima program bertujuan Lansia di Indonesia sendiri masih terbatas, dan hanya di beberapa wilayah saja, seperti; Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kota Tangerang Selatan. Namun program bantuan untuk Lansia tidak terbatas pada Bantu-Lu saja, masih terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan komponen Lansia.

Program bantuan sosial Lansia dari pemerintah pusat seperti; Program bertujuan Lanjut Usia dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan komponen Lansia diatas, masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau Lansia-Lansia di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga diperlukan program dukungan Lansia serupa yang digagas oleh pemerintahan pada level daerah atau bahkan pemerintah di level desa. Kehadiran program serupa, seluruh level

pemerintahan telah bergotong royong dan menegaskan komitmennya dalam melayani kelompok rentan.

Pemerintah Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, memiliki program keberpihakan kepada kelompok Lansia rentan. Upaya tersebut disalurkan dalam program kesejahteraan lanjut usia, merupakan program yang langsung digagas oleh Pemerintah Desa Lengkong, yang programnya diatur Langsung melalui Peraturan tingkat desa, dan juga anggaran yang digunakan langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini kepekaan Pemerintah Desa Lengkong sangat tajam merespon kebutuhan masyarakatnya, tujuan program sosial ini tidak lain untuk menjamin para Lansia Desa Lengkong, dapat menjalani kehidupan yang nyaman sampai menutup usia. Program yang memiliki kebaruan di Kabupaten Jember ini, menarik untuk diteliti implementasi programnya, sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang menyentuh kelompok rentan Lansia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah; bagaimana implementasi prosedur program bantuan kesejahteraan Lansia di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan bantuan lanjut usia di Desa Lengkong, dalam mewujudkan kesejahteraan Lansia yang programnya didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan luaran dari suatu hasil kegiatan penelitian, yang memberikan dampak kebermanfaatan. Dampak kebermanfaatan tersebut menjangkau ilmu pengetahuan, yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut;

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan *feedback /* umpan balik kepada Pemerintah Desa Lengkong, yang berlokasi di lingkungan Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, mengenai implementasi proses kesejahteraan Lansia.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini akan berkontribusi terhadap peneliti-peneliti selanjutnya, untuk melakukan kajian kepustakaan yang terkait dengan konsep pemberdayaan Lansia, baik dalam rumpun keilmuan Ilmu Pemerintahan (*governance and policy perspectives*) maupun ilmu sosial dan kesejahteraan (*social and welfare*). Hasil penelitian yang telah dilakukan, juga dapat berkontribusi terhadap teori implementasi kebijakan, yang berfokus kepada implementasi kebijakan pada sektor publik. Implementasi Program Kesejahteraan Lansia (Studi di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember).